

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Bank Indonesia

1. Sejarah Bank Indonesia

1) Kelembagaan

Sejarah kelembagaan Bank Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang (UU) No. 11/1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Dalam melakukan tugasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Moneter, Direksi, dan Dewan Penasehat. Di tangan Dewan Moneter inilah, kebijakan moneter ditetapkan, meski tanggung jawabnya berada pada pemerintah. Setelah sempat dilebur ke dalam bank tunggal, pada masa awal orde baru, landasan Bank Indonesia berubah melalui UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Sejak saat itu, Bank Indonesia berfungsi sebagai bank sentral dan sekaligus membantu pemerintah dalam pembangunan dengan menjalankan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan bantuan Dewan Moneter. Dengan demikian, Bank Indonesia tidak lagi dipimpin oleh Dewan Moneter. Setelah orde baru berlalu, Bank Indonesia dapat mencapai independensinya melalui UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah dengan UU No. 3/2004. Sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki kedudukan khusus dalam struktur kenegaraan sebagai lembaga negara yang independen dan bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lain.

Namun, dalam melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia harus mempertimbangkan pula kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

2) Moneter

Setelah berdirinya Bank Indonesia, kebijakan moneter di Indonesia secara umum ditetapkan oleh Dewan Moneter dan pemerintah bertanggung jawab atasnya. Mengingat buruknya perekonomian pasca perang, yang ditempuh pertama kali dalam bidang moneter adalah upaya perbaikan posisi cadangan devisa melalui kegiatan ekspor dan impor. Pada periode ekonomi terpimpin, pembiayaan deficit spending keuangan negara terus meningkat, terutama untuk membiayai proyek politik pemerintah. Laju inflasi terus membumbung tinggi sehingga dilakukan dua kali pengetatan moneter, yaitu tahun 1959 dan 1965. Lepas dari periode tersebut pemerintah memasuki masa pemulihan ekonomi melalui program stabilisasi dan rehabilitasi yang kemudian diteruskan dengan kebijakan deregulasi bidang keuangan dan moneter pada awal 1980-an. Di tengah pasang surutnya kondisi perekonomian, lahirlah berbagai paket kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat struktur perekonomian Indonesia.

Mulai pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi moneter menerpa Indonesia. Nilai tukar rupiah melemah, sistem pembayaran terancam

macet, dan banyak utang luar negeri yang tak terselesaikan. Berbagai langkah ditempuh, mulai dari pengetatan moneter hingga beberapa program pemulihan IMF yang diperoleh melalui beberapa Letter of Intent (LoI) pada tahun 1998. Namun akhirnya masa suram dapat terlewati. Perekonomian semakin membaik seiring dengan kondisi politik yang stabil pada masa reformasi. Sejalan dengan itu, tahun 1999 merupakan tonggak bersejarah bagi Bank Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3/2004. Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sesuai undang-undang tersebut, Bank Indonesia diwajibkan untuk menetapkan target inflasi yang akan dicapai sebagai landasan bagi perencanaan dan pengendalian moneter. Selain itu, utang luar negeri berhasil dijadwalkan kembali dan kerjasama dengan IMF diakhiri melalui Post Program Monitoring (PPM) pada 2004.

3) Perbankan

Saat kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, struktur ekonomi Indonesia masih didominasi oleh struktur kolonial. Bank-bank asing masih merajai kegiatan perbankan nasional, sementara peranan bank-bank nasional dalam negeri masih terlampau kecil. Hingga masa menjelang lahirnya Bank Indonesia pada tahun 1953, pengawasan dan pembinaan

bank-bank belum terselenggara. De Javasche Bank adalah bank asing pertama yang dinasionalisasi dan kemudian menjelma menjadi BI sebagai bank sentral Indonesia. Beberapa tahun kemudian, seiring dengan memanasnya hubungan RI-Belanda, dilakukan nasionalisasi atas bank-bank milik Belanda. Berikutnya, sistem ekonomi terpimpin telah membawa bank-bank pemerintah kepada sistem bank tunggal yang tidak bertahan lama. Orde baru datang membawa perubahan dalam bidang perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Mulai saat itu, sistem perbankan berada dalam kesatuan sistem dan kesatuan pimpinan, yaitu melalui pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan dukungan pemerintah, dalam kurun waktu 1971-1972 melaksanakan kebijakan penertiban bank swasta nasional dengan sasaran mengurangi jumlah bank swasta nasional, karena jumlahnya terlalu banyak dan sebagian besar terdiri atas bank-bank kecil yang sangat lemah dalam permodalan dan manajemen. Selain itu, Bank Indonesia juga menyediakan dana yang cukup besar melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk program-program Kredit Investasi Kecil (KIK)/Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Investasi (KI), Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI), Kredit Koperasi (Kakop), Kredit Profesi Guru (KPG), dan sebagainya. Dengan langkah ini, BI telah mengambil posisi sebagai penyedia dana terbesar dalam pembangunan ekonomi di luar dana APBN.

Industri perbankan Indonesia telah menjadi industri yang hampir seluruh aspek kegiatannya diatur oleh pemerintah dan BI. Regulasi tersebut menyebabkan kurangnya inisiatif perbankan. Tahun 1983 merupakan titik awal BI memberikan kebebasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga, baik kredit maupun tabungan dan deposito. Tujuannya adalah untuk membangun sistem perbankan yang sehat, efisien, dan tangguh. Kebijakan selanjutnya merupakan titik balik dari kebijakan pemerintah dalam penertiban perbankan tahun 1971-1972 dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88), yaitu kemudahan pemberian izin usaha bank baru, izin pembukaan kantor cabang, dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Pada periode selanjutnya, perbankan nasional mulai menghadapi masalah meningkatnya kredit macet. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pemberian kredit oleh perbankan terutama untuk sektor properti. Keadaan ekonomi mulai memanas dan tingkat inflasi mulai bergerak naik.

Ketika krisis moneter 1997 melanda, struktur perbankan Indonesia porak poranda. Pada tanggal 1 November 1997, dikeluarkan kebijakan pemerintah yang melikuidasi 16 bank swasta. Hal ini mengakibatkan kepanikan di masyarakat. Oleh karena itu, Bank Indonesia turun mengatasi keadaan dengan Bantuan Likuiditas Bank

Indonesia (BLBI) atas dasar kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, berbagai tindakan restrukturisasi dijalankan oleh Bank Indonesia bersama pemerintah.

4) Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam Undang-Undang (UU) No. 11/1953 ditetapkan bahwa Bank Indonesia (BI) hanya mengeluarkan uang kertas dengan nilai lima rupiah ke atas, sedangkan pemerintah berwenang mengeluarkan uang kertas dan uang logam dalam pecahan di bawah lima rupiah. Uang kertas pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah uang kertas bertanda tahun 1952 dalam tujuh pecahan. Selanjutnya, berdasarkan UU No. 13/1968, BI mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam semua pecahan. Sejak saat itu, pemerintah tidak lagi menerbitkan uang kertas dan uang logam. Uang logam pertama yang dikeluarkan oleh BI adalah emisi tahun 1970. Pada era 1990-an, BI mengeluarkan uang dalam pecahan besar, yaitu Rp 20.000 (1992), Rp 50.000 (1993), dan Rp 100.000 (1999). Hal itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan uang pecahan besar seiring dengan perkembangan ekonomi yang tengah berlangsung saat itu.

Sementara itu, dalam bidang pembayaran non tunai, BI telah memulai langkahnya dengan menetapkan diri sebagai kantor

perhitungan sentral menjelang akhir tahun 1954. Sebagai bank sentral, sejak awal BI telah berupaya keras dalam pengawasan dan penyehatan sistem pembayaran giral. BI juga terus berusaha untuk menyempurnakan berbagai sistem pembayaran giral dalam negeri dan luar negeri. Pada periode 1980 sampai dengan 1990-an, pertumbuhan ekonomi semakin membaik dan volume transaksi pembayaran non tunai juga semakin meningkat. Oleh karena itu, BI mulai menggunakan sistem yang lebih efektif dan canggih dalam penyelesaian transaksi pembayaran non tunai. Berbagai sistem seperti Semi Otomasi Kliring Lokal (SOKL) dengan basis personal computer dan Sistem Transfer Dana Antar Kantor Terotomasi dan Terintegrasi (SAKTI) dengan sistem paperless transaction terus dikembangkan dan disempurnakan. Akhirnya, BI berhasil menciptakan berbagai perangkat sistem elektronik seperti BI-LINE, Sistem Kliring Elektronik Jakarta (SKEJ), Real Time Gross Settlement (RTGS), Sistem Informasi Kliring Jarak Jauh (SIKJJ), kliring warkat antar wilayah kerja (intercity clearing), dan Scriptless Securities Settlement System (S4) yang semakin mempermudah pelaksanaan pembayaran non tunai di Indonesia.

2. Tujuan dan Tugas Pokok Bank Indonesia

1) Tujuan

Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan

nilai rupiah dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang ditetapkan. Hal ini tercantum dalam UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kestabilan nilai rupiah tersebut mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sedangkan aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.

2.) Tugas

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, sesuai dengan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mengemban tiga tugas yang dikenal sebagai Tiga Pilar Bank Indonesia, yaitu:

1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 1999, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi serta melakukan pengendalian jumlah uang beredar dengan menggunakan berbagai instrumen kebijakan moneter

2) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

Sistem pembayaran yang lancar dan aman merupakan salah satu prasyarat dalam keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan moneter. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran melalui kewenangannya dalam:

a. Menetapkan penggunaan alat pembayaran

Kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran tersebut meliputi alat pembayaran tunai dan nontunai. Kewenangan dalam menetapkan penggunaan alat pembayaran tunai meliputi mengeluarkan, mengedarkan, menarik, dan memusnahkan uang rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan, serta tanggal mulai berlakunya.

b. Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran

Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, serta kewenangan untuk mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya kepada Bank Indonesia. Di samping itu, Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring dan menyelenggarakan kliring antar bank, serta menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

3) Mengatur dan mengawasi bank.

Tugas pengaturan dan pengawasan bank merupakan salah satu tugas yang penting khususnya dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat yang pada akhirnya akan dapat mendorong efektivitas kebijakan moneter.

Pelaksanaan ketiga bidang tugas tersebut mempunyai keterkaitan dan karenanya dilakukan secara saling mendukung guna tercapainya tujuan Bank Indonesia secara efektif dan efisien.

3. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

1) Visi

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

2) Misi

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

3) Nilai-nilai Strategis

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen, dan pegawai untuk bertindak dan berperilaku dalam rangka mencapai misi dan visinya yang terdiri atas **Kompetensi, Integritas, Transparansi, Akuntabilitas, dan kebersamaan** yang dinyatakan dengan istilah ‘KITA-Kompak’

- Yang dimaksud dengan **kompetensi** adalah kondisi pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang telah ditetapkan
- **Integritas** adalah konsistensi dan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti-KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme), serta mengutamakan kepentingan organisasi. Nilai integritas ini mempunyai peran sentral dalam pelaksanaan tugas dan misi Bank Indonesia
- **Transparansi** adalah kejelasan dan keterbukaan dalam latar belakang dan hasil suatu tujuan, keputusan, ataupun langkah kerja baik organisasi maupun individu pegawai. Dengan nilai transparansi tersebut diharapkan akan mendasari keterbukaan hubungan antar pribadi pegawai dan antar satuan kerja, maupun keterbukaan terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap setiap kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia.
- **Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban yang jelas dari masing-masing individu atas semua tindakan yang diambil beserta

konsekuensinya, terutama dalam hal penyelesaian tugas dan pengambilan keputusan.

- **Kebersamaan** adalah rasa persatuan atau kekompakan yang ada di dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu ataupun sesama satuan kerja yang mampu mendukung terciptanya komunikasi dan kerja sama yang baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.

4. Struktur Organisasi Bank Indonesia

Sampai saat ini satuan kerja di Kantor Pusat Bank Indonesia berkedudukan di Jakarta, terdiri dari 21 Direktorat, empat Unit Khusus, satu Pusat Pendidikan, dan Studi Kebanksentralan, serta tiga Biro yang tidak berada di bawah Direktorat. Satuan Kerja Bank Indonesia di daerah disebut Kantor Bank Indonesia (KBI) dan berjumlah 41 kantor. Sedangkan satuan kerja Bank Indonesia di luar negeri dinamakan Kantor Perwakilan (KPw) dan berjumlah empat kantor yang berlokasi di London, New York, Tokyo, dan Singapura.

Dalam pelaksanaan tugasnya, masing-masing satuan kerja di Kantor Pusat, KBI, dan KPw membawahkan sub-sub unit satuan kerja sesuai dengan lingkup tugas dan beban kerjanya. Satuan kerja di Kantor Pusat yang berbentuk:

1. Direktorat membawahkan beberapa Biro, bagian, dan atau Tim

2. Biro (yang tidak berada di bawah Direktorat) membawahkan beberapa Tim, dan atau Bagian
3. Unit Khusus yang membawahkan Tim-Tim
4. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan membawahkan Kelompok Peneliti

Bagan Struktur Organisasi Bank Indonesia dilampirkan

5. Kantor Bank Indonesia

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan serta tugas-tugas Bank Indonesia, maka telah dibentuk Kantor Bank Indonesia (KBI) di berbagai daerah. KBI pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan (*extended arms*) dalam melaksanakan tugas-tugas Bank Indonesia dan melaksanakan hubungan kerja dengan pihak-pihak lain yang terkait (*extended stakeholders*).

Sebagai wakil Bank Indonesia di daerah, KBI diwajibkan untuk membina hubungan baik dengan Pemda, instansi pemerintah lainnya, dan masyarakat setempat agar dapat memberikan masukan dan sekaligus memperoleh informasi yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan oleh satuan kerja di Kantor Pusat.

6. Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia, diperlukan informasi dan analisis mengenai keadaan ekonomi, moneter, dan perbankan yang terjadi di luar Indonesia, khususnya pada pusat-pusat pasar keuangan dan modal dunia. Selain itu, untuk mendukung peningkatan kualitas perumusan kebijakan dan memberikan informasi yang terkait dengan tugas bank Indonesia kepada berbagai pihak di luar negeri, Bank Indonesia membuka berbagai Kantor Perwakilan di luar negeri dan saat ini terdapat empat kantor perwakilan Bank Indonesia yaitu di New York, London, Tokyo, dan Singapura.

B. CSR Bank Indonesia

Untuk menunjukkan bentuk kepedulian Bank Indonesia terhadap masyarakat, maka Bank Indonesia membuat kebijakan yang menyangkut tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang dilakukan di luar dari tugas dan tanggung jawab Bank Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1994 mengenai tugas Bank Indonesia. Kebijakan CSR Bank Indonesia diimplementasikan dalam bentuk kegiatan yang mengarah pada bentuk program kepedulian sosial terhadap masyarakat. Bentuk kepedulian kepada masyarakat sekitar / relasi komunitas yang dilakukan Bank Indonesia dapat diartikan sangat luas, namun secara singkat dapat dimengerti sebagai

peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya bersama bagi organisasi dan komunitas. CSR BI ini selain wujud penerapan prinsip *Good Corporate Governance* juga terkait untuk mendukung pencapaian tujuan *Millenium Goals Development*, salah satu diantaranya pengurangan angka kemiskinan menjadi setengah pada tahun 2015 dari sekitar 1,3 miliar sekarang ini melalui CSR dengan konsentrasi UMKM, peningkatan taraf pendidikan masyarakat melalui CSR dengan konsentrasi edukasi dan pelestarian kuantitas dan kualitas lingkungan melalui CSR dengan konsentrasi lingkungan. CSR BI merupakan tanggung jawab Bank Indonesia untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan *stakeholders* sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, pendidikan dan lingkungan disamping ekonomi

Untuk mewujudkan praktek CSR, Bank Indonesia melakukan pengembangan terhadap pendekatan kebijakan CSR. Implementasi dari kebijakan CSR Bank Indonesia atau yang dikenal dengan *Bank Indonesia Social Responsibility* dilakukan dalam serangkaian program kepedulian sosial atau tindakan kedermawanan (*philanthropic*). Dasar dari program kepedulian sosial tersebut adalah Bank Indonesia ingin menunjukkan komitmen kepada masyarakat bahwa Bank Indonesia sungguh-sungguh ingin membina hubungan dan berpartisipasi di tengah masyarakat untuk memajukan masyarakat dan memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat.

Publik sasaran CSR Bank Indonesia adalah masyarakat. Yang disebut sebagai masyarakat adalah meliputi semua lapisan masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia, sedangkan yang dimaksud sebagai komunitas adalah masyarakat dalam lingkup yang lebih spesifik. Jadi sebenarnya komunitas yang dimaksud oleh Bank Indonesia merupakan bagian dari masyarakat luas. Bank Indonesia menyebut masyarakat sebagai salah satu stakeholders, karena keberadaannya sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan dan kinerja Bank Indonesia.

CSR yang dilakukan oleh Bank Indonesia dipahami sebagai salah satu bentuk komunikasi dengan publik eksternal (*stakeholders*) khususnya masyarakat (komunitas). Komunikasi tersebut dilakukan untuk menunjukkan kepedulian Bank Indonesia kepada masyarakat. Kepedulian terhadap masyarakat atau menjalin relasi dengan publik eksternal juga dipahami Bank Indonesia sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan masyarakat, yang di dalam hal ini merupakan salah satu publik eksternal (*stakeholders*) Bank Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa CSR yang dilakukan Bank Indonesia merupakan salah satu kegiatan kehumasan.

Biro Humas memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan pelaksanaan CSR Bank Indonesia. Biro Humas mewujudkan tujuan CSR Bank Indonesia dengan merumuskan ke dalam konsep kegiatan CSR agar tujuan CSR Bank Indonesia dapat tersampaikan dengan baik pada publik sasaran dan

program yang dijalankan juga dapat mendukung kinerja Bank Indonesia secara keseluruhan. Tujuan CSR yang secara umum dipahami Bank Indonesia adalah untuk mewujudkan kepedulian terhadap pihak-pihak yang membutuhkan bantuan atau uluran tangan. Dari tujuan CSR yang dipahami Bank Indonesia tersebut, maka Biro Humas mengembangkan bentuk kepedulian tersebut ke dalam suatu konsep kedermawanan (*philanthropic*) dan mengimplementasikannya ke dalam kegiatan-kegiatan sosial. Tujuan dari konsep tersebut, Bank Indonesia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebagai lembaga independen di Indonesia, Bank Indonesia di luar menjalankan tugasnya masih memiliki kepedulian kepada masyarakat.

Kebijakan CSR Bank Indonesia atau yang dikenal dengan *Bank Indonesia Social Responsibility* terbagi atas dua bentuk kepedulian:

1. BSR Filantropis, bentuk kepedulian yang diberikan hanya dalam bentuk pemberian bantuan / sumbangan tali kasih kepada masyarakat luas yang membutuhkan.
2. BSR Strategis Filantropis, yaitu program pemberian bantuan dan pengelolaan sumber daya yang lebih terencana dan terfokus, dan hasil akhirnya dapat mendukung pencapaian tugas-tugas Bank Indonesia. BSR filantropis sifatnya lebih kepada pemberdayaan masyarakat pada suatu komunitas, sedangkan BSR filantropis sifatnya lebih kepada program *charity*.

Menurut Naniek Sekarningsih, Analisis Tim Relasi Eksternal Kelompok Relasi Komunitas Tim CSR, “Tujuan dari Program BSR Strategis Filantropis

pada publik sasaran sebenarnya untuk menjadikan publik sasaran tersebut menjadi masyarakat yang mandiri dan produktif. Selain itu supaya ada perubahan perilaku bagi kemajuan masyarakat itu sendiri.”Menurut Dian Ediana Rae, Ketua Umum Ikatan Pegawai Bank Indonesia (Ipebi) dalam kutipan yang diambil dari laporan BSR 2006, yaitu bahwa dalam setiap program BSR di sana harus ada *change of human being*, mengubah manusia agar menjadi lebih baik, mengandung artian bahwa program CSR yang dilakukan BI harus mampu mengubah pola pikir bahkan bisa mengubah kultur msyarakat penerima program ke tingkat yang lebih maju.

Implementasi Program BSR dengan pendekatan filantropi strategis pertama dijalankan pada tahun 2006, diimplementasikan dalam Program Desa Kita yang berwujud program pembinaan terhadap desa yang terpilih dengan tujuan akhir hendak menjadikan desa-desa binaan tersebut menjadi desa yang mandiri. Definisi desa yang mandiri adalah desa yang mampu mengembangkan dirinya sendiri, dapat memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang ada dan tanpa bergantung pada pihak-pihak manapun. Program Desa Kita dilakukan secara bertahap (*multi years*) dan diharapkan menajdi *benchmark* atau dapat menajdi contoh program bagi lembaga atau institusi lain (perbankan), agar juga dapat melaksanakannya. Program yang dilakukan secara bertahap tersebut mengarah kepada *community development*, yaitu sangat membuka kesempatan atau keterlibatan masyarakat untuk bersama-sama dengan Bank Indonesia membangun desanya. .

Tema Program CSR BI

Dengan dasar pemikiran bahwa komunikasi merupakan hal pokok bagi BI untuk membina relationship dan menunjukkan kepedulian terhadap komunitasnya, BI melalui program CSR berusaha untuk mengedepankan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak dengan tujuan untuk:

1. meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi menengah dan kecil;
2. membantu program Pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas serta mampu berkompetisi dengan SDM asing; dan
3. meningkatkan dan memelihara ekosistem melalui kerjasama dengan segenap masyarakat

Atas dasar itu, tema program CSR Bank Indonesia direfleksikan dalam slogan :

BI COMMUNICATE - eCOsystem, sMall MediUm eNterprIse, and eduCATion for peoplE

C. Program Desa Kita

Program “Desa Kita” yang dilaksanakan Bank Indonesia sebagai perwujudan dari CSR merupakan bentuk sinergi antara Bank Indonesia, Pemda, dan penduduk desa. CSR Bank Indonesia dilaksanakan berdasarkan *time schedule* strategi program yang telah disusun supaya program tersebut dapat mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Strategi program tersebut dilakukan dalam serangkaian bentuk aktivitas.

Program Desa Kita diharapkan dapat menciptakan *multiplier effect* bagi pengembangan desa-desa lainnya. Inilah esensi dari Program Desa Kita, yang telah direalisasikan Bank Indonesia sejak tahun 2006. Prinsip utama yang diembal dalam Program Desa Kita adalah tingginya keterlibatan masyarakat dan kesinambungan program

1. Tujuan, Target, Visi, Misi, dan Sasaran Program

Untuk dapat melaksanakan program dengan efektif, disusunlah tujuan, target, visi, dan misi dari Program “Desa Kita”, yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan : Menyediakan infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan memberikan bantuan teknis untuk perekonomian masyarakat desa dalam rangka mencapai sasaran desa yang mandiri.

2) Target : Meningkatkan *awareness* mengenai Kepedulian BI

3) Visi : Menjadi program pengembangan masyarakat yang teruji dalam mendukung terwujudnya desa-desa pengetahuan yang mandiri

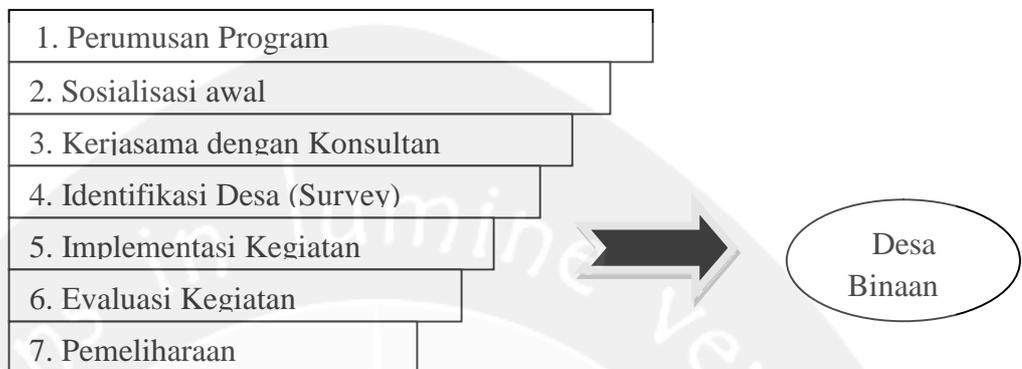
4) Misi: Mewujudkan masyarakat yang produktif dan mampu mengembangkan dirinya sendiri baik secara fisik (finansial/ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan) maupun secara non fisik (pengetahuan, sikap, dan perilaku)

Dari visi tersebut, jelas bahwa program BSR mengarah pada program pemberdayaan masyarakat yang menjadikan masyarakat mandiri. Program Desa Kita sebagai wujud BSR dilakukan dalam rangka meningkatkan *awareness* masyarakat sehubungan dengan kepedulian Bank Indonesia. Kegiatan BSR melalui program Desa Kita, dalam implementasinya, selain harus dikerjakan juga perlu diperhatikan strategi komunikasinya agar tujuan pengembangan citra Bank Indonesia juga dapat tercapai.

Tahapan-tahapan yang dilakukan tim CSR BI dalam implementasi CSR pada program Desa Kita, dirumuskan dalam strategi program Desa Kita, yang dapat dicermati melalui penjelasan berikut (*Sumber: hand-out Program CSR Terfokus Bank Indonesia 2006*)

Gambar 2

Strategi Program Desa Kita



Sumber: hand-out Program CSR Terfokus Bank Indonesia 2006

5) Sasaran Program

Adapun sasaran umum dari program “Desa Kita” berdasarkan visi misi program “Desa Kita” Bank Indonesia yaitu:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Desa

IPM mengukur tiga dimensi dari pembangunan manusia, yaitu:

- a. Kesehatan dan panjang usia (diukur dengan angka harapan hidup)
- b. Kesempatan memperoleh pendidikan yang layak (diukur dengan angka melek huruf dan tingkat keikutsertaan dalam pendidikan dasar, menengah, dan tinggi)

- c. Kelayakan standar hidup (diukur dengan daya beli dan penghasilan penduduk)
2. Kemandirian dan *sustainability* desa dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:
- a. Desa memiliki kompetensi inti dan produk/ komoditas unggulan
 - b. Adanya kelembagaan dan operasionalisasi usaha desa yang melibatkan keseluruhan warga masyarakat desa
 - c. Desa memiliki sistem pengembangan produk, terdiri dari kemampuan untuk melakukan survei pasar secara sederhana atau sistem umpan balik pasar terhadap produk
 - d. Profitabilitas usaha desa
 - e. Pengembangan permodalan usaha
 - f. Tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan perekonomian desa, baik untuk kebutuhan SDM saat ini maupun selanjutnya

Menjelang berakhirnya Program Desa Kita di desa-desa binaan, Bank Indonesia bersama masyarakat setempat tengah mempersiapkan diri guna memasuki periode *phasing out*. Dalam periode *phasing out* ini dilaksanakan serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan serah terima hasil-hasil pengembangan dan memiliki focus pada keberlanjutan dari pengembangan

yang telah dilakukan. rangkaian kegiatan dalam periode *phasing out* ini mengacu pada pedoman kunci keberlanjutan yang dirumuskan ke dalam 4-M, yaitu Memanfaatkan, Memelihara, Mengelola, dan Mensosialisasikan.

D. Program “Desa Kita” di Desa Manding, Bantul, Yogyakarta

Pada bulan Agustus 2006, pasca gempa di Yogyakarta (Mei 2006), Bank Indonesia (BI) mengirim perwakilan untuk datang ke Desa Manding. Desa Manding terkenal sebagai sentra kerajinan kulit sejak tahun 1958, dan sempat mengalami masa keemasan sekitar tahun 1970-an. Pasca gempa, Desa Manding mengalami keterpurukan ekonomi, baik dari segi fisik (bangunan dan fasilitas yang hancur) maupun non fisik (warga yang putus asa dan kehilangan semangat untuk melanjutkan usaha). Terkait dengan kondisi tersebut, BI ingin membantu mengangkat Desa Manding dari keterpurukan ekonomi akibat gempa melalui sebuah bentuk aktivitas CSR yang disebut Program “Desa Kita”. Menurut Endang Setiadi, Pemimpin Bank Indonesia Yogyakarta saat itu, alasan pemilihan desa Manding sebagai tempat pelaksanaan program adalah karena kabupaten Bantul termasuk tempat yang terkena dampak gempa lebih parah dibanding kabupaten lain. Selain itu di situ ada sentra kerajinan kulit shg bisa cepat dikembangkan dengan baik dan dapat membantu menghidupkan pengrajin kulit di manding.

Langkah pertama yang diambil oleh BI adalah mengadakan pertemuan tukar pendapat dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan kelompok

pengrajin. Untuk menindaklanjuti rencana BI tersebut, dibentuklah sebuah panitia yang berfungsi untuk mengkoordinasi jalannya program dan menjadi penghubung antara masyarakat Desa Manding dengan pihak BI. Beberapa di antara panitia yang dibentuk antara lain Atmaji selaku Ketua, Sarjimin (perwakilan kelompok pengrajin) sebagai bendahara, Purwoko, Usep, dan Dahil (petugas BI) sebagai penghubung antara BI- warga Desa Manding, dan lain sebagainya.

Setelah dibentuk panitia, dilakukan beberapa langkah berikut sebagai landasan implementasi program:

1. Inventarisasi jumlah dan identitas warga desa yang perlu dibantu

Panitia program diminta untuk mengumpulkan data dan membuat daftar warga desa yang memerlukan bantuan. Melalui pendaftaran ini, dapat diperkirakan jumlah bantuan yang diperlukan dan ditentukan sasaran yang paling tepat untuk menerima bantuan tersebut.

2. Jaring aspirasi dari warga

Dalam kegiatan jaring aspirasi ini, warga desa dibagi menjadi 4 kelompok:

- a. Remaja / karang taruna

- b. Pengrajin

c. Ibu-ibu

d. Kelompok lain

BI melakukan *sharing* dengan keempat kelompok masyarakat tersebut secara terpisah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa pengelompokan yang tepat akan membantu warga untuk lebih terbuka mengemukakan pendapat selama *sharing*. Dalam kegiatan ini, setiap warga diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau keinginan terkait dengan bentuk bantuan yang akan diberikan BI nantinya. Setiap usulan dan keinginan warga lalu ditampung dan diolah oleh pihak BI, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat untuk kemudian diseleksi dan diputuskan, kira-kira bentuk bantuan seperti apa yang merupakan prioritas dan harus dipenuhi dalam waktu dekat.

3. Pertemuan secara berkala dengan pihak BI untuk membicarakan program

Berdasarkan hasil jaring aspirasi dengan warga Manding dan diskusi antara tokoh masyarakat, pihak BI, dan pemerintah daerah, maka diputuskan bahwa bantuan yang akan diberikan kepada desa Manding melalui Program “Desa Kita” dibagi menjadi empat aspek, yaitu:

- 1) aspek perekonomian,
- 2) aspek pendidikan,
- 3) aspek kesehatan
- 4) aspek lingkungan hidup

Pembangunan pada keempat aspek tersebut terdiri atas pembangunan fisik dan non fisik. Program “Desa Kita” pada tahun pertama memprioritaskan pembangunan pada pembangunan fisik, antara lain:

1) Pembangunan gapura

Gapura adalah aspek fisik yang pertama kali dibangun melalui Program “Desa Kita”. Gapura sebagai penanda pintu masuk ke desa Manding tersebut diresmikan pada bulan Desember 2006, bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Bank Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Bantul.

2) Pembangunan balai dusun

Mengingat bahwa balai dusun adalah infrastruktur yang penting bagi masyarakat desa, maka BI membantu pembangunan kembali balai dusun yang rusak akibat gempa.

3) Pembangunan perpustakaan

4) Pembangunan Unit Kesehatan Karyawan (UKK)

5) Pembangunan saluran pembuangan / *drainase*

6) Pembangunan taman parkir

7) Pemasangan papan nama penunjuk arah dan baliho di tempat-tempat strategis

8) Pemasangan bak sampah

9) Pembangunan mesin ATM

Pembangunan aspek non fisik meliputi:

- 1) Pelatihan manajemen (pengelolaan ekonomi)
- 2) Mengikutsertakan pengrajin pada berbagai pameran kerajinan.
- 3) Bantuan promosi hasil kerajinan warga dari Bank Indonesia melalui pengadaan *leaflet* tentang kerajinan kulit Desa Manding di tempat-tempat strategis seperti bandara, hotel, dan tempat-tempat tujuan wisata
- 4) Penyediaan buku-buku dan komputer untuk perpustakaan desa
- 5) Pelatihan pengelolaan perpustakaan untuk ibu-ibu
- 6) Beasiswa untuk anak SD dan SMP
- 4) Pelatihan keahlian komputer untuk remaja dan Karang Taruna
- 7) Pelatihan Bahasa Inggris untuk anak-anak remaja dan Karang Taruna